

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Annisa, Ayya Sofia, 2014, *Warga Negara dan Penjara*, PolGov, Yogyakarta
- Batinggi A., dan Ahmad Badu, 2013, *Manajemen Pelayanan Publik*, ANDI, Yogyakarta,
- C.I Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djembatan, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 1983, *Dari Penjara ke Pemasyarakatan*, Departemen Kehakiman, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2004, *40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2014, *Buku Strategi Penerapan Standar Pelayanan Pemasyarakatan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- M. Hariwijaya & Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*, Hanggar Kreator, Yogyakarta, 2008
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 25
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta
- Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- R. Soefondo, 1982, *Kebutuhan Biologis bagi Narapidana ditinjau dari Segi*

*Hukum, Agama dan Psikologi*, Jakarta

R.A Koesnoen 1961, *Politik Penjara Nasional*, Sumur Bandung, Bandung

Ratminto, 2005, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat., 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung

SF. Marbun & Moh Mahfud MD, 2006, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Sujatno, Adi, 2008, *Pencerahan Di Balik Penjara*, Teraju, Jakarta

Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI)

Tim Penyusun Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan dan Tim Universitas Indonesia, 2013, *Cetak Biru Kegiatan Narapidana*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 40

## **B. Hasil Penelitian**

Sugeng Riyadin, 2012, *Tesis : Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Sub-sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Studi Khusus tentang Lapas Terbuka Jakarta*, Universitas Indonesia, Jakarta

Ni Made Destriana Alviani, 2015, *Skripsi : Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar*, Universitas Udayana, Bali

Charmelita Juan Fernandez, 2017, *Skripsi : Program Pemasyarakatan bagi Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Aryani Farah Nabila, 2017, *Skripsi : Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pelatihan bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Salemba*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

### C. Artikel Internet

<http://www.Lapaskerobokan.com/sekilas-pandang/>, diakses pada Minggu 7 Januari 2018, Pukul 20.34

<http://www.Lapaskerobokan.com/statistika-warga-binaan/> , diakses pada Minggu 7 Januari 2018, Pukul 20.34

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarkatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 77), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225), (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Dirjen Pemasyarakatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676)

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-14.OT.02.02 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan